

PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN CIAWI

Frans goo¹, Denny Hernawan^{1*}, G. Goris Seran¹

¹Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Djuanda

*Corresponding Author: denny.hernawan@unida.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of infrastructure development programs and map out what factors influence infrastructure development programs. This research took place in Ciawi Sub-District, Bogor Regency, West Java Province, Indonesia. The research method used a descriptive analysis method with a qualitative approach. The determination of informants was carried out by purposive sampling, namely people who knew the infrastructure development program in Ciawi District. Data collection used observation and in-depth interviews. Data analysis used qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that the implementation of Participatory Development in Ciawi Sub-District, Bogor Regency, West Java Province, has been implemented well, as indicated by the community's participation in the development planning and implementation of infrastructure development. Support factors that influence participatory infrastructure development are community awareness, community participation, and local governments, while the inhibiting factors for participatory infrastructure development are the quality of public education, the level of community income, and development facilities/equipment.

Keywords: Participation, Development Planning, Village Improvement

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pembangunan infrastruktur, dan memetakan faktor-faktor apa yang mempengaruhi program pembangunan infrastruktur. Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu sebanyak orang yang mengetahui program pembangunan infrastruktur di Kecamatan Ciawi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Analisa data dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sudah terlaksana dengan baik yang ditunjukkan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perencanaan, serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi proses pembangunan infrastruktur partisipatif adalah kesadaran masyarakat, partisipasi rakyat, dukungan dari pemerintah daerah, sedangkan faktor penghambat pembangunan infrastruktur partisipatif adalah kualitas pendidikan masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat, dan fasilitas/peralatan pembangunan.

Kata kunci: Partisipasi, Perencanaan Pembangunan, Perbaikan Kampung.

PENDAHULUAN

Pembangunan suatu negara pada hakekatnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, begitu juga

dengan negara Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV, yakni tujuan pembangunan nasional bangsa

Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Sehingga jika pembangunan belum mampu mensejahterakan masyarakatnya maka pembangunan tersebut belum dikatakan berhasil (Syawie, 2014).

Tujuan mensejahterakan masyarakat dapat tercapai dengan mensyaratkan keselarasan pembangunan pusat dan daerah, mulai dari tingkat desa sampai pada tingkat nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka pembangunan nasional pada dasarnya harus disokong oleh unsur-unsur pembangunan daerah atau lebih dikenal dengan membangun Indonesia dari desa (Jamal, 2009), (Soleh, 2017), karena kemajuan desa sangat mempengaruhi kemajuan perekonomian di Indonesia.

Oleh karena tujuan pembangunan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, maka sudah seharusnya masyarakat dilibatkan sebagai subjek pembangunan (Teja, 2015), (Milla & Suprojo, 2016). Mengingat pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan, maka sistem perencanaan pembangunan harus memberi ruang untuk dirancang secara bottom up, dengan merangkul semua kelompok kepentingan, menumbuhkan rasa memiliki dan dihargai serta kemandirian masyarakat (Legi, W. Y. Rompas, & Pombengi, 2015).

Proyek-proyek infrastruktur lebih banyak didominasi oleh pembangunan di perkotaan dengan sistem yang masih sentralistik. Hal ini menyebabkan pembangunan perkotaan dan pedesaan menjadi timpang. Ketimpangan ini membuat kelompok masyarakat miskin sulit untuk mencapai kesejahteraan (Wilson Yudho, 2009), (Warda, Elmira, Rizky, Nurbani, & Izzati, 2018). Padahal mayoritas penduduk Indonesia adalah masyarakat pedesaan, sebanyak 119.321.070 jiwa

(50,21%) bertempat tinggal di pedesaan, dan sebanyak 118.320.256 jiwa (49,79%) tinggal di daerah perkotaan (BPS, 2010). Data tersebut menunjukkan bahwa banyak masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang tinggal di pedesaan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat pedesaan, sehingga tercipta pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip bottom up.

Partisipasi merupakan faktor penting dalam pembangunan. Keberadaannya dapat disetarakan dengan kebutuhan dasar manusia. Partisipasi merupakan salah satu hak asasi manusia (Yusuf, 2014), sehingga ketersediaan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kebutuhan yang tidak dapat terelakkan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, kewenangan untuk melakukan pembangunan dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Pembagian kewenangan ini memungkinkan semua elemen dari tingkat masyarakat, RT, RW, Desa berpartisipasi dalam pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasil pembangunan.

Demi menunjang kelancaran pembangunan pada tingkat desa, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang ini memberi arah kebijakan tata kelola desa secara nasional. Namun kurangnya pemahaman atas Undang-Undang Desa dapat menyebabkan kegagalan dalam pengelolaan dana desa (Asti & Cholid, 2018).

Berdasarkan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, maka masyarakat desa dituntut untuk bersikap partisipatif dan aspiratif terhadap pembangunan di desanya. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dapat berupa tenaga, pemikiran atau sumbangan materi secara langsung dalam proses dan pelaksanaan pembangunan desa. Keberadaan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan membuat pembangunan tersebut menjadi lebih efektif dan efisien.

Sejak digulirkannya dana desa 1 milyar, kemampuan desa untuk mengelola pembangunan menjadi sangat krusial. Desa harus mampu bersama-sama masyarakat menyusun program perencanaan pembangunan, melaksanakannya, mengawasinya dan mendistribusikannya agar manfaat pembangunan merata dinikmati oleh seluruh masyarakat. Faktanya, belum semua desa memiliki kapasitas yang cukup untuk membuat perencanaan dan melaksanakan pembangunan (Sulismadi, Wahyudi, & Muslimin, 2018). Oleh karena itu keberadaan partisipasi masyarakat menjadi dukungan bagi desa dalam melaksanakan pembangunan.

Pembangunan yang berbasis partisipasi mensyaratkan pendekatan bottom up planning. Pemikiran dan ide bersama dibangun dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi yaitu gotong royong. Nilai-nilai gotong menjadi penggerak partisipasi masyarakat (Taslin, 2017).

Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa di lingkungan Kecamatan Ciawi; faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah banyak dilakukan, namun fokusnya berbeda-beda. Ada yang memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Dengan mengambil kasus Program Corporate Social Responsibility (CSR), Nurbaiti & Bambang (2008) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh dua factor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi karakteristik, kemauan dan kemampuan. Adapun faktor eksternal antara lain peran stakeholder dan

kesempatan yang diberikan (Nurbaiti & Bambang, 2008).

Penelitian lainnya memfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota yang berkelanjutan dan berkeadilan. Penelitian ini menghasilkan data bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunin dapat terwujud dalam bentuk: (1) memperjuangkan nasibnya sendiri; (2) adanya kesadaran sebagai bagian dari masyarakat dan negara; (3) respon atas kebijakan; (4) dipengaruhi kualitas dan kuantitas informasi. Namun bagi Pemerintah, partisipasi masyarakat merupakan inspirasi dan motivasi dalam pembangunan (Yusuf, 2014).

Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur juga pernah dilakukan dengan mengambil kasus pada program alokasi dana desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap program tersebut masih kurang maksimal terutama dalam tahap pelaksanaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan. Beberapa factor yang dinilai mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Antara lain faktor pendidikan, faktor pekerjaan dan pendapatan masyarakat (Hardianti, Muhammad, & Lutfi, 2017).

Penelitian partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur juga dilakukan dengan mengambil kasus jalan desa di Kabupaten Lanny Jaya-Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Bentuk partisipasi saran dan kritik disampaikan pada tahap perencanaan. Pada tahap pelaksanaan, sebesar 77% masyarakat berpartisipasi dalam bentuk tenaga, sebesar 18% dalam bentuk material dan dalam bentuk tanah dan tanam tumbuh sebesar 3% dan 2% dalam bentuk uang. Pada tahap

pemeliharaan umumnya masyarakat berpartisipasi dalam bentuk tenaga (46,29%)(Teraik Kogoya, Benu Olfie, 2015).

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang menghasilkan data bahwa tingkat partisipasi masyarakat dikategorikan baik dengan persentase 78,65%. Indikator tertinggi adalah pada partisipasi dalam perencanaan pembangunan terutama pada pengambilan keputusan yang dibuktikan dengan kehadiran pada rapat musrenbang(Latif, Irwan, Rusdi, Mustanir, & Sutrisno, 2019).

Dari beberapa penelitian terdahulu diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan terdapat dalam beberapa tahapan pembangunan dan beberapa bentuk. Partisipasi paling banyak adalah dalam bentuk pemikiran, khususnya pada tahap perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang, Antara lain termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Partisipasi didefinisikan sebagai kemauan masyarakat untuk berkontribusi terhadap pembangunan, baik dalam tahapan perencanaan, maupun pelaksanaan(Latif et al., 2019), (Adisasmata, 2006). Artinya melibatkan orang dalam kegiatan pembangunan secara sukarela(Rohimat, Rahmawati, & Seran, 2017). Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan(Hardianti et al., 2017) (Hardianti et al., 2017), (Purnamasari, 2011).

Dalam konteks masyarakat adat, partisipasi bisa menjadi sumber kekuatan bagi ketahanan pangan(Pratidina, Zenju,

Sukarelawati, & Sastrawan, 2020). Artinya partisipasi dapat menjadi dukungan utama dalam pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik. Partisipasi adalah bentuk lain dari solidaritas sosial masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, partisipasi masyarakat juga bisa menjadi sarana untuk perbaikan kualitas pelayanan publik(Salbiah, Purnamasari, Fitriah, & Agustini, 2020).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibedakan dalam tahapan perencanaan, Partisipasi dalam Pelaksanaan, Partisipasi dalam pengawasan dan penilaian(Hardianti et al., 2017). Sementara dalam penelitian ini partisipasi dibedakan dalam 4 tahap yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan/pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera(Sudjana, 2018). Namun demikian pembangunan belum merata dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, salahsatunya disebabkan oleh faktor geografis(Sudjana, 2018). Faktor geografi berdampak pada distribusi pelaksanaan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat. Penetapan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa kurangnya tingkat partisipasi masyarakat di wilayah ini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi penelitian ini adalah masyarakat dan pegawai Kecamatan Ciawi yang mengetahui program pembangunan infrastruktur. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Purposive sampling adalah pengambilan sampel yang disengaja berdasarkan pertimbangan pengetahuan mereka tentang pembangunan infrastruktur di Kecamatan Ciawi. Informan kunci (*key informant*)

penelitian ini adalah Camat, Kepala Desa dan tokoh masyarakat. Adapun informan pelengkap yaitu masyarakat yang terlibat dalam pembangunan partisipatif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder baik dalam bentuk angka maupun uraian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara (*interview*), observasi dan studi iteratur.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Komponen dalam analisis data yaitu: Reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*), kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Ciawi, merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Wilayah Kecamatan Ciawi pada dasarnya merupakan wilayah yang strategis dan produktif serta didukung dengan kekayaan sumberdaya yang potensial, cenderung kurang dapat memberikan kontribusi yang berarti, antara lain diantaranya dapat dilihat dari capaian poin IPM dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum. Oleh karena hal tersebut, maka wilayah Kecamatan Ciawi membutuhkan pemerataan pembangunan infrastruktur agar dapat menunjang potensi wilayah Kecamatan Ciawi yang strategis serta agar dapat mendistribusikan kekayaan dan sumberdaya alam yang terdapat di wilayah tersebut ke luar daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pembangunan infrastruktur pedesaan pada dasarnya merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri, maka pembangunan tersebut sangat membutuhkan partisipasi masyarakat untuk melancarkan proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan merupakan suatu kewajiban, melainkan adalah hak bagi masyarakat untuk terjun langsung berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada pemanfaatan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, daerah berhak mengatur pembangunan, dan mendorong agar masyarakat berpartisipasi dalam membangun di daerahnya, termasuk pembangunan infrastruktur.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Ciawi dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (3) UUD 1945. Bentuk keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pemberitahuan informasi, konsultasi, dialog, tukar pikiran, musyawarah, menyatakan pendapat, dan interaksi semuanya merupakan hak asasi warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 E ayat (3) dan 28F UUD 1945.

Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Ciwi dinilai oleh beberapa informan sudah bersifat pareto superior yaitu pembangunan yang menguntungkan segala pihak terutama masyarakat, bukan pareto optimal (pembangunan yang mengorbankan orang lain). Namun demikian, pembangunan infrastruktur di Kecamatan Ciawi belum mampu mencapai tujuan utama pembangunan yaitu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini disebabkan, dampak dari pembangunan infrastruktur tidak dirasakan secara langsung berpengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakatnya.

Ditinjau dari aspek partisipasi, pembangunan di Kecamatan Ciawi sudah menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Berjalannya partisipasi masyarakat tersebut karena merupakan

bagian dari strategi. Peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (*public support*) (Nurbaiti & Bambang, 2008). Pembangunan tanpa dukungan masyarakat tidak dapat berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Selain itu partisipasi juga dapat memberi dampak pada kualitas hidup manusia menjadi lebih baik (Purnamasari, 2011).

Peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa juga semakin terasa sejak diberlakukannya dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa secara resmi telah diberlakukan sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian dana desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal dana desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya dana desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing di luar warga desa untuk menyalurkan dana di wilayah tersebut.

Dengan diterapkannya dana desa tersebut, maka warga desa dapat merencanakan dengan sendiri kebutuhan yang dimilikinya untuk kemudian melaksanakan pembangunan. Tahap awal yang dilakukan dalam proses pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) adalah sosialisasi pelaksanaan program. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pembina dan dinas atau instansi terkait dengan program ADD ini. Kegiatan

sosialisasi program ADD dinilai sangat penting oleh masyarakat karena memberikan pemahaman mengenai rencana dan tujuan dari program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 bahwa proses perencanaan pembangunan desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Ciawi dilakukan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat, melalui serangkaian kegiatan, sebagai berikut: sosialisasi arah pembangunan desa, musyawarah bersama warga desa terkait kebutuhan pembangunan di desa tersebut dan pembentukan panitia pembangunan desa (PPD) sebagai pelaksana, sebagaimana dikemukakan oleh informan 1: "Proses perencanaan yang dilakukan di Kecamatan Ciawi ini selalu memperhatikan partisipasi masyarakat. Masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap proses pembangunan. Pertama itu kita sosialisasi dulu, kita jelaskan kalau nanti ada dana desa, jadi masyarakat harus memikirkan kebutuhan pembangunan desa. Setelah itu kita musyawarah bareng-bareng bersama unsur kecamatan, pejabat desa, dan sesepuh desa. Disitu kita bicarakan bareng-bareng kebutuhan pembangunan yang ada di desa apa, misalnya, di desa butuh perbaikan jalan atau perbaikan saluran irigasi. Setelah diputuskan di musyawarah itu, kita bentuk panitia pembangunannya. Dari situ akan kelihatan kalau partisipasi warga itu sangat jelas terlihat, minimal mereka dapat memberikan sumbangan ide bagi pembangunan".

Apa yang disampaikan oleh informan 1 sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan 2. Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan 2 sebagai berikut: "Kalau partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa kita itu pasti ada. Apalagi sejak ada dana desa. Dana desa mewajibkan kita untuk selalu melibatkan warga desa dalam pembangunan. Apalagi sekarang itu zamannya sudah terbuka, jadi kalau kita

tidak terbuka dengan warga sendiri, nanti kita bisa kena masalah. Mekanisme partisipasinya dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut: Pertama, kita ajak mereka musyawarah, disitu kita bahas mengenai kebutuhan desa. Setelah disetujui kebutuhannya. Nanti kita buat susunan panitia pembangunan desa sama sekalian pengawas dana desa, soalnya kalau tidak diawasi nanti bisa bahaya. Nah, semua proses tersebut selalu melibatkan masyarakat. Belum lagi kalau proses eksekusi, biasanya kita adakan gotong royong, kita kerja bareng-bareng jadi warga juga bisa bantu tenaga.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Ciawi selalu memperhatikan partisipasi warga masyarakatnya, terutama terkait dengan perencanaan pembangunan. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam proses perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Ciawi, dalam proses sosialisasi, musyawarah majelis desa, dan pembentukan panitia pembangunan desa. Masyarakat turut aktif dalam berpartisipasi menyumbangkan ide dan gagasan terkait perencanaan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dinilai sudah baik, dilihat dari bentuk partisipasi, baik berupa tenaga, bahan material maupun uang. Namun tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini tidak simetris. Masyarakat yang berperanserta dalam perencanaan, belum tentu aktif dalam pelaksanaan, begitupun sebaliknya.

Keberhasilan pembangunan dapat terwujud dengan adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses

politik, proses sosial dan hubungan antara kelompok kepentingan sehingga mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Masyarakat lokal dan organisasi desa adalah faktor yang esensial dalam menilai keberhasilan pembangunan. Dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, prinsip inilah yang membuat pembangunan dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesadaran yang tinggi mampu berpartisipasi tanpa harus tergantung pada ada tidaknya dorongan dari orang lain. Namun kesadaran itu harus dibangun, salah satunya melalui peran dan figure pimpinan. Pimpinan yang menunjukkan teladanitas dapat menjadi pendorong bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat. Melalui partisipasi masyarakat secara sadar akan mendukung sumberdaya yang ada untuk pembangunan(Purnamasari, 2011).

Bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa di Kecamatan Ciawi adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Pemikiran

Pembangunan desa diperlukan dan dibutuhkan oleh seluruh penduduk desa sehingga dampak dari pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh penduduk desa. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam bentuk pemikiran menjadi penentu berlangsungnya pembangunan desa.

Partisipasi dalam bentuk pemikiran dilakukan melalui proses perencanaan. Masyarakat dilibatkan dalam merumuskan perencanaan maupun dalam mengambil keputusan untuk pembangunan desa.

Mengingat pembangunan desa pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, maka masyarakat dituntut untuk dapat menyampaikan kebutuhan masyarakat desa sehingga

pembangunan yang nanti akan dilaksanakan dapat memenuhi kebutuhan warga desa. Dengan demikian, maka partisipasi masyarakat desa pada dasarnya tidak hanya berbentuk sumbangan berupa materi saja, melainkan dapat berpartisipasi dalam bentuk lain salah satunya adalah partisipasi pikiran. Partisipasi pikiran dalam proses pelaksanaan pembangunan desa di Kecamatan Ciawi adalah dengan memberikan sumbangsih berupa ide dan gagasan terkait pelaksanaan pembangunan di desa di Kecamatan Ciawi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dengan informan 2 menyebutkan bahwa dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Ciawi selalu bertumpu pada dua prinsip dasar yaitu prinsip tukar pendapat dan saling gotong royong. Prinsip tukar pendapat yang diterapkan di Desa Ciawi memungkinkan seluruh warganya untuk dapat memberikan sumbangsih pikiran dan saran dalam setiap kegiatan pembangunan di desa tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Informan 1 sebagai berikut :

“Pelaksanaan pembangunan yang ada di desa kita ini selalu didasarkan pada dua prinsip mas. Yaitu prinsip gotong royong dan prinsip saling bertukar pendapat. Dengan begitu setiap warga pasti punya partisipasi pada pembangunan desa. Minimal sumbangsih pikiran lah. Disini juga selalu diadakan musyawarah sebelum dilaksanakan pembangunan. Jadi apa-apa yang akan dilakukan selalu dimusyawarahkan. Selain itu, setiap satu bulan sekali juga selalu ada rapat desa dengan warga yang diadakan setiap sebulan sekali.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Ciawi memiliki partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa

Ciawi berupa partisipasi pikiran yang disalurkan melalui musyawarah-musyawarah yang dilaksanakan setiap akan dilaksanakan program pembangunan desa. Melalui forum musyawarah desa, masyarakat dapat menyumbangkan ide dan gagasan yang dimilikinya dalam mendukung kesuksesan pembangunan desa. Selain itu, peran sumbangsih pikiran masyarakat desa juga dapat dilihat dalam rapat bulanan yang diadakan oleh pejabat desa dengan sesepuh desa dan stakeholder yang bertujuan untuk mencari solusi bersama terkait pembangunan desa.

2. Partisipasi Tenaga

Masyarakat Kecamatan Ciawi merupakan masyarakat yang terkenal dengan kedekatan sosial yang dimiliki antara satu warga dengan warga lainnya. Sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya, gotong royong merupakan salah satu sifat dasar yang dimiliki oleh masyarakat Ciawi. Oleh karena itu, partisipasi tenaga merupakan bentuk partisipasi yang banyak dilakukan oleh warga Kecamatan Ciawi setelah partisipasi pemikiran.

Khususnya dalam pembangunan infrastruktur Desa di wilayah Kecamatan Ciawi, partisipasi dalam bentuk tenaga merupakan bentuk partisipasi yang paling banyak dilakukan disamping partisipasi pemikiran. Sejarah mencatat bahwa masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tinggal di pedesaan dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan atas dasar gotong-royong atau swadaya.

Dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Ciawi selalu menyertakan masyarakat dalam setiap kegiatan tersebut. Seringkali, proyek pembangunan dilaksanakan oleh warga sekitar sendiri dengan cara gotong royong dengan melalui

swadaya masyarakat sekitar. Kegiatan gotong royong tersebut dilaksanakan apabila masyarakat memandang bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut merupakan hal yang mereka butuhkan bersama-sama. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh informan 1 yang menjelaskan sebagai berikut: "Selain partisipasi pikiran, masyarakat di Kecamatan Ciawi juga terkenal dengan gotong royong yang kuat. Disini kalau ada perlu apa-apa yang dianggap keperluan bersama, pasti langsung dikerakan dengan gotong royong, seperti renovasi masjid, renovasi balai desa, renovasi puskesmas, atau perbaikan irigasi. Itu semuanya dilakukan dengan swadaya masyarakat. Kecuali kalau memang ada dana desa yang turun, kita gak gotong royong lagi, tapi kita sewa tenaga tukang professional, walaupun biasanya tukangnyanya ya warga kita juga".

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi tenaga yang dilakukan oleh warga Kecamatan Ciawi dalam proyek pembangunan infrastruktur desa dilakukan dengan cara gotong royong.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi Pembangunan

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat. Terutama dalam negara yang menjunjung asas demokrasi, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangat penting, meliputi keterlibatan dalam penentuan tujuan pembangunan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan evaluasinya. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam tahap pelaksanaan dan perencanaan

pembangunan saja, namun partisipasi juga dapat berlangsung hingga tahap evaluasi pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pemahaman yang dicapai bersama mengenai bagaimana pembangunan, nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat.

Partisipasi dalam evaluasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan dari hasil-hasil perencanaan, apakah telah sesuai dengan apa yang direncanakan bersama sebelumnya. Masyarakat dapat memberikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Partisipasi dalam evaluasi ini memiliki tujuan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang atau pun yang telah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan bersama sebelumnya. Evaluasi juga membantu pembangunan yang akan dilakukan nantinya dapat berjalan dengan lancar, dengan belajar dari hasil evaluasi pada pembangunan sebelumnya. Partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam proses evaluasi mencakup evaluasi terhadap hasil pembangunan apakah telah sesuai dengan perencanaan, kinerja dari pihak yang terlibat dalam pembangunan, realisasi anggaran pembangunan, serta membahas pengembangan desa lebih lanjut.

Terkait pembangunan yang ada di Kecamatan Ciawi, tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi dirasa masih kurang. Dimana setiap pembangunan yang telah dilakukan, setelahnya jarang dilakukan evaluasi bersama seluruh warga yang terlibat. Hal ini yang diungkapkan oleh informan 2 sebagai berikut: "Biasanya kita memang jarang mengadakan

evaluasi bersama, adapun evaluasi itu kita adakan saat ada pembangunan besar seperti pembangunan jalan desa waktu itu. Jadi warga dari perwakilan tiap RT dan beberapa pihak yang ikut bekerja kita kumpulkan. Disana kita bahas proses pembangunannya selama ini. Kalau pembangunan yang skala kecil kita tidak mungkin kumpulkan warga, karena untuk mengumpulkan warga itu susah kalau yang dibahas hanya hal-hal kecil. Kadang juga kita mengumpulkan warga untuk sosialisasi, namun yang datang tidak semuanya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam hal pembangunan serta sedikitnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan bersama, terutama dalam hal evaluasi. Terbukti dari jarangya evaluasi dilakukan setelah pembangunan selesai dilaksanakan. Padahal evaluasi perlu dilakukan secara rutin bersama warga sehingga pendapat warga dapat tersampaikan.

Belum adanya pemahaman oleh pemerintah desa maupun warga terkait evaluasi dapat membantu pembangunan selanjutnya. Hal ini terlihat dari pembahasan selama pertemuan untuk evaluasi, seperti yang diungkapkan oleh informan 2 sebagai berikut: “Kalau evaluasi itu biasanya kita adakan pertemuan bersama warga, apa yang kita bahas disana itu tentang bagaimana kinerja para pekerja, apakah ada kendala dan sebagainya, bagian apa yang kurang, keluhan warga juga bisa disampaikan selama pertemuan itu. Jadi evaluasinya seperti itu..yang penting warga mengetahui selama pembangunan itu bagaimana prosesnya”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa belum adanya pembahasan terkait pengembangan potensi untuk

pembangunan selanjutnya. Serta anggaran pembangunan tidak disampaikan kepada warga secara terbuka.

4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil mencakup pemahaman masyarakat dengan menilai penting keberadaan hasil dari pembangunan yang ada, kesediaan masyarakat untuk merawat dan melestarikan bersama hasil pembangunan, serta kesediaan dalam mengembangkan lebih jauh pembangunan yang ada. Pemanfaatan hasil yang dilakukan oleh masyarakat beragam baik secara positif maupun negatif.

Terkait pembangunan yang ada di Kecamatan Ciawi, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil dari pembangunan yang ada terbilang masih rendah. Pemanfaatan yang dilakukan lebih banyak berupa hal negatif seperti yang disampaikan oleh informan 1 sebagai berikut: “Dari yang saya lihat, warga Ciawi masih kurang kesadarannya untuk merawat bersama fasilitas desa yang sudah dibangun itu. Seperti MCK (Mandi Cuci Kakus)/ Toilet umum atau TPT yang sudah kita bangun, kadang MCK masih ada barang seperti gayung hilang atau kalau kotor tidak ada yang mau bersihkan. Banyak yang berpikir kalau itu sudah ada petugas yang membersihkan dan merawat”. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat dalam menjaga fasilitas sebagai bagian dari pembangunan desa bersama. Sehingga dapat dikatakan partisipasi warga Ciawi dalam pemanfaatan hasil masih kurang.

Namun selain hal negatif yang disebutkan oleh informan 2, terdapat

juga pemanfaatan yang menunjukkan hal positif dari warga Ciawi seperti yang dijelaskan informan 1 sebagai berikut: "Saya rasa semua warga disini menjaga baik fasilitas yang sudah dibangun bersama itu. Karena mereka juga merasakan fasilitas bersama itu penting, seperti bangunan jembatan dan irigasi itu, semua itu memudahkan kerja warga. Waktu itu pernah ada bagian jalan yang rusak kayak lubang-lubang, warga langsung gotong-royong bersama untuk memperbaiki jalannya. Pemerintah yang menyiapkan dana untuk aspalnya, kita dari warga yang bekerja". Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan masih adanya kesadaran warga akan pentingnya fasilitas desa sebagai hasil dari pembangunan bersama. Warga pun memberikan partisipasinya dengan menggunakan fasilitas tersebut dan melakukan perbaikan bersama.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Ciawi, yaitu:

1. Kesadaran masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama dengan informan 3 sebagai warga yakni: "Alasan dari kami ikut berpartisipasi dalam pembangunan karena kami masih memiliki rasa solidaritas yang sangat tinggi antar sesama warga masyarakat untuk saling membantu. Kami juga memang terbiasa akan kerja gotong royong. Apa yang telah disampaikan oleh informan 3 didukung pula oleh informan 4 sebagai berikut: "kesadaran masyarakat merupakan faktor penting, karena tanpa ini akan sulit mendorong partisipasi, karena semua orang merasa sibuk bekerja". Berdasarkan pendapat dari informan tersebut, dapat dikatakan bahwa faktor kesadaran berpengaruh terhadap tingkat partisipasi.

2. Solidaritas sosial

Salah satu pendorong partisipasi masyarakat adalah solidaritas sosial yang tinggi diantara sesama anggota masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh informan 5. "Partisipasi memberikan kesempatan masyarakat berperanserta dalam kegiatan pembangunan sebagai wujud kepedulian warga terhadap kondisi lingkungannya".

3. Kepemimpinan Pemerintahan Desa dan Kecamatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat telah dapat memberikan teladan yang baik sehingga dapat tercipta berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Camat atau Kepala Desa merupakan panutan warga masyarakat yang mampu memadukan berbagai ragam sifat/karakter warga masyarakatnya yang berbeda-beda. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan 3. "Kalau menurut pendapat saya suatu pembangunan itu dinilai berhasil atau tidak bukan hanya dilihat dari partisipasi masyarakatnya saja tapi harus didukung juga dari pemerintah desa atau kecamatan dan aparatnya. Pendapat informan 3 ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan 1. "keberhasilan pembangunan ditentukan dua hal yaitu partisipasi masyarakat dan dukungan dari Camat". Berdasarkan penjelasan informan 3 dan informan 1 bahwa kepemimpinan Camat menjadi faktor penting dalam mendorong kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi.

4. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dipengaruhi adanya kualitas pendidikan dari masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat dapat memahami 2 (dua) hal berikut ini:

- a. Memahami tentang pembangunan partisipatif, seperti tentang konsep perencanaan pembangunan (Akbar, Suprpto, & Surati, 2018).
- b. Memahami tentang program-program pembangunan yang menjadi kewenangan Kecamatan dan Desa.

Sebagaimana dikemukakan oleh informan 6: “Faktor pendidikan mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap pembangunan dan pentingnya partisipasi dalam pembangunan”. Senada dengan apa yang disampaikan oleh informan 1:

“Masyarakat yang menghadiri rapat pada saat perencanaan pembangunan adalah orang-orang yang mengerti. Dari sekian orang yang hadir tersebut hanya orang-orang berpendidikan yang berani berbicara mengemukakan aspirasinya”. Hasil wawancara dengan 2 orang informan tersebut meegaskan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap partisipasinya dalam pembangunan, khususnya dalam partisipasi pemikiran.

5. Tingkat Pendapatan Masyarakat

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah sumbangan uang/dana. Besarnya sumbangan dana tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Penghasilan masyarakat di Kecamatan Ciawi berbeda-beda, maka sangat memungkinkan pula partisipasinya dalam pembangunan berbeda-beda.

Berdasarkan hasil pantauan peneliti selama melakukan penelitian yang ditegaskan oleh beberapa informan yang diwawancara secara langsung. Dalam hal ini didukung oleh pernyataan informan 1: “masyarakat berada berpartisipasi dalam bentuk uang, sedangkan yang penghasilannya rendah berpartisipasi dalam bentuk tenaga”. Dengan

demikian, penghasilan menentukan bentuk partisipasi.

6. Keuangan Waktu

Disamping penghasilan yang tidak sama juga tingkat kesibukannya (waktu/kerja) berbeda-beda pula. Semua itu dapat mengurangi partisipasinya dalam pembangunan. Kebanyakan orang kaya yang memiliki keuangan waktu sedikit, memberikan partisipasi dalam bentuk uang, sedangkan orang yang memiliki keuangan waktu umumnya juga berpartisipasi dalam bentuk tenaga.

7. Fasilitas/Peralatan

Faktor lain yang dikemukakan oleh informan 1 berkaitan dengan tugas pemerintah kecamatan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah ketersediaan fasilitas dan peralatan yang memadai.

Dalam pelaksanaan tugas kecamatan, dibutuhkan adanya kantor Kecamatan yang representative. Fasilitas ruang tunggu, fasilitas pelaksanaan kerja operasional, fasilitas pelayanan dan fasilitas pendukung lainnya menjadi syarat sebuah kantor dinilai representative. Perlengkapan / fasilitas kantor dapat menunjang kelancaran kerja pegawainya. Namun bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan kerja pegawai..

KESIMPULAN

Pelaksanaan program pembagunan infrastruktur di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sudah terlaksana dengan baik. Hal ini diketahui berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut: (a) Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, sehingga terjadi kerjasama yang harmonis antara pemerintah desa, kecamatan dan masyarakatnya; (b) Adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan infrastruktur, yaitu dengan jalan sosialisasi dan musyawarah

bersama terkait dengan kebutuhan pembangunan infrastuktur desa; (c) Adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yaitu dalam bentuk partisipasi pemikiran dan partisipasi tenaga.

Terdapat factor-faktor yang mempengaruhi pembangunan partisipatif masyarakat Kecamatan Ciawi baik yang mendukung maupun yang menghambat. Faktor Pendukung yang mempengaruhi tingkat Partisipatif Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Ciawi, sebagai berikut: (a) Kesadaran Masyarakat; (b) Solidaritas Sosial; (c) Kepemimpinan.

Faktor Penghambat yang mempengaruhi tingkat Partisipatif Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Ciawi sebagai berikut: (a) Kualitas Pendidikan Masyarakat; (b) Tingkat Pendapatan Masyarakat; (c) Keuangan waktu; (d) Fasilitas/Peralatan. Penulis harus menjelaskan implikasi hasil penelitiannya dalam pengembangan keilmuan, dan dampaknya terhadap lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan/atau hukum. Implikasi dipaparkan dalam bahasa yang sederhana agar pembaca noncendekia dapat memahaminya dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asti, & Cholid, I. (2018). Persepsi dan partisipasi pemerintah desa dalam perencanaan pengembangan Bumdes di Kecamatan Kendawangan. *Jurnal Agribisnis Indonesia, ISSN 2354-5690; E-ISSN 2579-3594*, 6(1 (Juni)), 1–14.
- Hardianti, S., Muhammad, H., & Lutfi, M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa (Program Alokasi Dana Desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota). *E-Jurnal Katalogis, ISSN: 2302-2019*, 5(1), 120–126.
- Jamal, E. (2009). Membangun momentum baru pembangunan pedesaan di Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian*, 28(1), 7–14.
- Latif, A., Irwan, Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal MODERAT*, 5(1 (February)), 1–15.
- Legi, R., W. Y. Rompas, M., & Pombengi, J. d. (2015). Implementasi pendekatan bottom up dalam perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(10), 50–62.
- Milla, A. B. M., & Suprojo, A. (2016). Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan sumberdaya manusia di Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962*, 5(2), 17–24.
- Nurbaiti, S. R., & Bambang, A. N. (2008). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR). In *Proceeding Biology Education Conference (Vol. 14 (1), pp. 224–228)*.
- Pratidina, G., Zenju, N. S., Sukarelawati, & Sastrawan, B. (2020). Kepemimpinan informal berbasis partisipasi masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan lokal. *Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928*, 11(1 (April)), 98–104.
- Purnamasari, I. (2011). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928*, 2(1 (April)), 89–101.
- Rohimat, D., Rahmawati, R., & Seran, G. G. (2017). Partisipasi masyarakat dalam implementasi program Kotaku/PNPM di Kecamatan Ciawi, 3, 71–80.
- Salbiah, E., Purnamasari, I., Fitriah, M., &

- Agustini. (2020). Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan. *Jurnal GOVERNANSI ISSN 2442-3971*, 6(1), 36–42.
- Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1 (Februari)), 32–52.
- Sudjana. (2018). Hakikat Adil dan Makmur Sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(2), 135–151.
- Sulismadi, Wahyudi, & Muslimin. (2018). Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing. *Aristo, Sosial Politik Humaniora*, 5(1), 216–258.
- Syawie, M. (2014). Pembangunan yang mensejahterakan masyarakat Indonesia: Sebuah kajian konsep. *INFORMASI*, 19(3), 191–204.
- Taslin. (2017). Nilai-nilai gotong royong dalam pembangunan desa pada Masyarakat Siompu (Studi di Desa Karae Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan). *SELAMI IPS ISSN 1410-2323*, 2(46), 152–163.
- Teja, M. (2015). Pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di Kawasan Pesisir. *Aspirasi*, 6(1 (Juni)), 63–76.
- Teraik Kogoya, Benu Olfie, dan O. E. L. (2015). Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa di Kabupaten Lanny Jaya-Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiens*, 15(2), 1–14.
- Warda, N., Elmira, E., Rizky, M., Nurbani, R., & Izzati, R. Al. (2018). *Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Perdesaan Indonesia, 2006 – 2016*.
- Wilsonoyudho, S. (2009). Kesenjangan dalam pembangunan kewilayahan. *Forum Geografi*, 23(2), 167–180.
- Yusuf, A. W. (2014). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota yang berkelanjutan dan berkeadilan. *Jurnal Administrasi Publik, ISSN 1412-7040*, 11(2 (Oktober)), 53–68.